

MANAJEMEN BANK SYARI'AH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN UANG HARAM (Studi Kasus di Perbankan Syari'ah Solo Raya)

SUMADI

STIE – AAS Surakarta

Email: sum_1924@yahoo.com

Abstract

Technological advances and the globalization of financial information, do not always have a positive impact for the community but sometimes it becomes the development of crime, especially white-collar crime (white collar crime), business crime (business crime), or a corporate crime (Corporate crime). Money laundering or commonly known as money laundering, is a method to hide, move, and use the result of a criminal act, the activities of criminal organizations, economic crime, narcotics trafficking, and other activities that constitute criminal activities.

Money laundering, essentially involves assets (income / wealth) disguised so that it can be used without being detected that such assets derived from illegal activities. Melalui money laundering income or assets derived from illegal activity is converted into a financial asset that seems to come from a legitimate source / legal.

Key Words : Money laundering, Economic syariah, Islamic Bank.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan, tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat akan tetapi terkadang justru menjadi berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan bisnis (*business crime*), atau kejahatan korporasi (*Coorporate crime*). (Erman Rajagukguk, 2001).

Money laundering merupakan, salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, seperti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar yang dijerat dengan dua undang-undang tindak pidana pencucian uang yang berbeda. KPK

menetapkan Akil sebagai tersangka pencucian uang dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (nasional.kompas.com, 2013).

Problematika uang haram ini sudah meminta perhatian, karena dimensi dan implikasinya daya rusak akibat yang ditimbulkan, maka menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk mencari solusi, memilih perangkat hukum untuk menghadang dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini.

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika

Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat*, yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini. (nasional.kompas.com, 2013)

Sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau yang lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama *Money Laundering* (J.E Sahetapy, *Business Uang Haram*, www.khn.go.id.)

Pencucian uang atau yang sering dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindakan pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktifitas kejahatan. *Money Laundering*, pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah

menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal (Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dan dalam konteks hukum Islam, dapat dikenai hukuman ta'zir bagi pelakunya.

Institusi Bank memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, akan tetapi disisi lain bank juga menjadi media arus pencucian uang haram "*money laundering*" ini. Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*), selain itu bank berperan dalam lau lintas pembayaran. Tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat tanpa instrument bank. Menurut Compton, tidak mungkin memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat (Eric N. Compton, *Principle of Banking*).

Menurut Remy Syahdeni, sekalipun tidak diketahui secara pasti berapa banyaknya uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan *money laundering* ini, tetapi jumlah taksirannya sangat besar. Mantan Managing Director IMF Michele Candessus, memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* antara 2 - 5 % dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Bahkan menurutnya batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting dan kejahatan yang sejenis itu yang di cuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US \$ 600 miliar.

Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, oleh karena itu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai Negara. Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh individu-individu yang tidak tergabung dalam organisasi-organisasi kejahatan telah mencapai tingkat yang jauh lebih serius daripada 15 tahun yang lampau. Badan kerjasama internasional pertama adalah The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang didirikan oleh G7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989.

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dilakukan Indonesia karena desakan internasional. Alasan ini kental sekali karena sejak tiga tahun lalu Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dalam

menanggulangi pencucian uang dan terancam sanksi internasional terutama oleh Financial Action Task Force karena tidak mempunyai UU tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam suatu Undang-undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pencucian uang dilakukan tujuan utama pelaku kejahatan melakukan pencucian uang adalah untuk menyamarkan hasil kejahatan agar si pelaku tersebut akhirnya bebas menikmati hasil kejahatannya.

Di Indonesia aturan tentang pencucian uang memang belum lama dibuat peraturan undang-undangnya, sejak jatuhnya orde baru (sekitar tahun 1998) banyak kekayaan para pejabat dan terutama kekayaan mantan Presiden Soeharto (keluarga cendana) yang menjadi sorotan publik, disanksikan oleh masyarakat karena diluar kewajaran dan diperkirakan diperoleh dari hasil korupsi selama beliau menjadi Presiden.

Secara umum proses pencucian uang ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap; Pertama, penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

Kedua, transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang

berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil placement ke beberapa rekening lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks. Layering dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun.

Ketiga, menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.

Pencucian uang dapat diselidiki dari transaksi-transaksi nasabah yang mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

Beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering

digunakan dalam pencucian uang, apabila tidak diperoleh informasi yang memuaskan maka transaksi-transaksi dibawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan :

1. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan langsung dengan penyedia jasa keuangan;
2. Penggunaan banyak rekening dengan alasan tidak jelas
3. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi dan kemudian dilakukan penarikan sekaligus
4. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening tidak aktif
5. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
6. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.

Nasabah yang berasal dari atau mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang no.25 tahun 2003, penyedia jasa keuangan (PJK) termasuk didalamnya adalah bank, wajib menyampaikan laporan

transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Laporan transaksi tersebut dikenal sebagai Cash Transaction Report (CTR).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang dilakukan dengan tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia jasa Keuangan (PJK), sebagai contoh bila nasabah pemegang rekening menyetor tunai minimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) hari kerja, maka bank wajib melaporkan transaksi tersebut ke PPATK. Kedua macam laporan tersebut akan digunakan oleh PPATK sebagai data untuk dilakukan analisa dan outputnya menjadi informasi intelegen keuangan yang akan diberikan kepada pihak yang berkompeten antara lain kejaksaan dan kepolisian untuk ditindak lanjuti.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sebagai lembaga independen yang bertugas menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK oleh UU TPPU diberi kewenangan untuk membantu penegak hukum memberantas tindak pidana

pencucian uang dari berbagai kejahatan, baik oleh perorangan maupun korporasi, dalam batas wilayah negara RI maupun di luar batas wilayah negara RI dengan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Money laundering, pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Dalam hukum pidana ekonomi konvensional, terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori absolute/ pembalasan (revenge) : yang berpandangan bahwa kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsure-unsur dijahtukannya hukuman.
2. Teori relative atau tujuan pencegahan (prevensi) : yang berpendapat bahwa dijatuhkannya hukuman adalah prevensi terjadinya kejahatan, baik itu prevensi umum maupun khusus pada terpidana.
3. Teori gabungan, yaitu absolute dengan relative, meskipun ada yang condong pada pembalasan tetapi ada pula yang ingi agar unsure pembalasan dan prevensi seimbang.

Suatu perbuatan akan dikatakan/ dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) manakala perbuatan tersebut itu memenuhi unsure-unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur *obyektif* dalam tindakan pidana adalah:

1. Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang.
2. Kausalitas (hubungan antara sebab dan akibat)
3. Bersifat melawan hukum

Sedangkan unsur-unsur *subyektif* nya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan (*schuld*), meliputi kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaiaan (*culpa*).
2. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berdasarkan pengertian diatas maka apabila suatu tindakan tidak memenuhi unsur *obyektif* dan *subyektif* maka tidak dapat dikatakan sebagai tidak pidana (delik). Maka *money laundering* dapat dikatakan suatu tindakan pidana dan perbuatan tercela, seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Ini berarti dapat diartikan bahwa kriminalisasi sebagai proses penetapan "pidana".

Pembentukan UU tindak pidana pencucian uang ini dimaksudkan agar segala bentuk pencucian uang dapat dicegah dan diberantas serta terhadap pelakunya diberikan sanksi hukum, karena sangat merugikan masyarakat dan Negara yang dapat mempengaruhi serta merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dan meningkatnya berbagai kejahatan. Hal ini sesungguhnya

sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' itu sendiri yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan masalah, artinya perbuatan yang justru menimbulkan kerusakan, kerugian, kemudaratn dan sekaligus menjauhkan kemaslahatan kehidupan manusia adalah perbuatan tercela dan terlarang dan perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana.

Islam sebagai agama dan ideologi (pandangan hidup), selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga sangat berkempentingan meletakkan basis-basis etika dan moral dalam hubungan manusia dengan sesama, Islam memiliki konsep yang jelas dalam mengajarkan soal harta, asal harta yang didapatkan dan pendistribusian harta. Islam memiliki ketentuan dalam mendapatkan harta yang benar dan sah, yaitu tidak terdapat unsur *al-batil* dan *az-zalim*, yakni jalan yang salah, penindasan, dan eksploitasi, yang sering kali berbentuk penipuan, pencurian, dan perampokan. Oleh karenanya, menjadi sebuah kepastian bahwa Islam melarang pemerolehan harta yang tidak benar dan melanggar ketentuan hukum Islam. Namun seiring berkembangnya waktu, tindak pidana terhadap harta terus berkembang dengan menggunakan istilah-istilah yang baru, termasuk di dalamnya; *money laundering*, *money politic*, dll.

Pencucian Uang dalam Ekonomi Islam

Pencucian uang merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional

khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia.

Hukum Ekonomi Islam yang berbasis pada al- Qur'an dan al-Hadits, sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk permasalahan moneter adalah solusi untuk mencegah dari *money laundering*, sebab dalam prakteknya *money laundering* merupakan permasalahan moneter yang terjadi di negara-negara Muslim pada khususnya dan negara-negara di dunia pada umumnya.

Berbeda dengan hukum ekonomi konvensional, ekonomi syariah memandang bahwa sebagai sebuah akibatnya apabila suatu tindakan sudah terkodifikasi dalam sebuah hukum atau Undang-undang, maka siapapun yang melanggar harus mendapatkan sanksi yang setimpal (hukuman). Pencucian uang adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga memerlukan tindak lanjut hukum dari penguasa atau hakim, dalam al-Qur'an surat al Ma'idah ayat 8 menyatakan bahwa seorang pemimpin harus bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditentukan oleh hukum-hukum syara', maka segala perbuatannya dihubungkan dengan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dia berhak menjadikan Undang-undang untuk melindungi kemaslahatan.

HASIL PEMBAHASAN

Praktek Manajemen Perbankan Syari'ah dalam Menjaga Sumber Mal dari money laundering.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, dimana penelitian *kualitatif* adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan *investigasi* karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Untuk mengetahui praktek perbankan syari'ah dalam menjaga sumber mal dari *money laundering*, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku usaha di perbankan syari'ah dengan menggunakan *snowball teory*. Adapun perbankan syari'ah yang diteliti adalah (Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta, BRI Syari'ah cabang Surakarta dan Bank Mega Syari'ah Sukoharjo).

Praktek perbankan syari'ah dalam menjaga sumber mal dari *money laundering*, yang diteliti penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRI S) Cabang Surakarta;

Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRI S) Cabang Surakarta, sebagai salah satu perbankan syari'ah di Indonesia, berusaha keras untuk menjaga sumber mal yang masuk dari *money laundering*, yaitu dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Menerapkan prinsip KYCP (*Know Your Customer Principle*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Asas mengenal Nasabah

- (*Know Your Costumer Principle*), ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui secara mendalam nasabah yang ingin menabung atau menginvestasikan modalnya.
- 2). Terhadap nasabah yang akan memasukkan uangnya ke bank, akan ada pertanyaan tentang uang tersebut berasal dari mana, serta ada juga dari customer service yang bertanya langsung kepada nasabah yang ingin menabung, uang tersebut berasal darimana, akan tetapi ini hanya berlaku pada nominal tertentu saja.
 - 3). Menjalni kerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sebagai lembaga independen yang bertugas menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRI Syari'ah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang akurat kepada PPATK.
- b. Bank Mega Syari'ah Cabang Sukoharjo;
- Bank Mega Syari'ah Cabang Sukoharjo, sebagai salah satu perbankan syari'ah yang termasuk baru/ muda yang ada di Indonesia, usaha yang dilakukan untuk menjaga sumber mal yang masuk dari *money laundering*, yaitu dengan upaya sebagai berikut:
- 1). Menjalankan dan menerapkan prinsip KYCP (*Know Your Custumer Principle*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Asas mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*), ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui secara mendalam nasabah yang ingin menabung atau menginvestasikan modalnya.
 - 2). Instrumen lain yang digunakan adalah di slip setoran, akan ada pertanyaan tentang uang tersebut berasal dari mana, serta ada juga dari customer service yang bertanya langsung kepada nasabah yang ingin menabung, uang tersebut berasal darimana ditanya kehalalannya.
 - 3). Menjalni kerjasama yang erat dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sebagai lembaga independen yang bertugas menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam hal ini Bank Mega Syari'ah Cabang Sukoharjo wajib memberikan informasi secara akurat dan transparan kepada PPATK.
- c. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta;
- Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, merupakan bank

syari'ah yang pertama lahir di Indonesia, tentunya memiliki pengalaman yang lebih terkait keuangan syari'ah dibandingkan bank-bank syari'ah setelahnya. Sebagai bank syari'ah tertua, bank muamalat juga berusaha keras untuk menjaga sumber mal yang masuk dari dana *money laundering*, salah satunya yaitu dengan upaya - upaya sebagai berikut:

- 1). Menerapkan prinsip KYCP (*Know Your Customer Principle*) dengan konsekuen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Asas mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), secara teknis bank akan memberikan formulir yang harus diisi nasabah yang akan menanamkan modalnya, hal ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui secara mendalam nasabah yang ingin menabung atau menginvestasikan modalnya.
- 2). Terhadap mekanisme setoran yang dilakukan nasabah, akan ada pertanyaan tentang uang tersebut berasal dari mana, serta ada juga dari customer service yang bertanya langsung kepada nasabah yang ingin menabung, uang tersebut berasal darimana, akan tetapi ini hanya berlaku pada nominal tertentu saja, biasanya nominal diatas 50 juta rupiah.
- 3). Menjalinkan kerjasama dengan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sebagai

lembaga independen yang bertugas menganalisis semua transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bank Muamalat memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang akurat sehingga bisa ikut serta dalam menjaga dan mencegah mal yang masuk ke bank muamalat dari praktek *money laundering*.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh hasil bahwa di dalam bank-bank syari'ah yang diteliti mengenai praktek penerapan prinsip kehalalan dalam menjaga sumber mal yang masuk ke dalam bank syari'ah, khususnya dalam hal ini adalah bagaimana bank syari'ah dalam menjaga sumber mal yang masuk dari *money laundering*, ditemukan bahwa bank-bank tersebut secara umum mempunyai mekanisme dalam menjaga kehalalan sumber mal yang masuk.

Salah satu contohnya di BRI syari'ah memiliki prinsip KYCP (*Know Your Customer Principle*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Asas mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui secara mendalam nasabah yang ingin menabung atau menginvestasikan modalnya. Dimana dalam KYCP tersebut dilaksanakan pada saat nasabah mulai membuka rekening pertama kali, calon nasabah diminta untuk mengisi form yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan berisikan data-data pribadi

seperti; nama, alamat, pekerjaan, no KTP, bahkan ada pertanyaan frekuensi setoran tiap bulannya kira-kira berapa. Instrumen lain yang digunakan salah satu bank syari'ah adalah di slip setoran ada pertanyaan uang tersebut berasal dari mana, serta ada juga dari customer service yang bertanya langsung kepada nasabah yang ingin menabung, uang tersebut berasal darimana. Dalam pelaksanaan di lapangan, dari hasil penelitian ternyata tidak semua bank syari'ah melaksanakan mekanisme menanyakan kepada nasabah terkait uang tersebut berasal darimana, hanya pada saat nominal tertentu saja bank tersebut bertanya kepada nasabah uangnya berasal darimana.

Prinsip yang dilaksanakan perbankan syari'ah iaitu prinsip mengenal nasabah, dilaksanakan dalam rangka pengendalian risiko. *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* merekomendasikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi karena bank tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya.

Sejalan dengan hal itu, pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah menawarkan beberapa konsep dasar prinsip syariah, salah satu diantaranya yaitu bahwa prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi

keuangan khususnya perbankan syariah diupayakan menghindari kegiatan yang dilarang, baik dalam bentuk larangan produk jasa dan proses yang merugikan serta berbahaya, maupun larangan penggunaan sumber dana illegal dan secara tidak adil. Hal ini selaras dengan tujuan prinsip mengenal nasabah sebagai implementasi dari pembangunan rezim anti pencucian uang (anti *money laundering regime*) yaitu agar penyedia jasa keuangan (*financial service provider*) tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran kegiatan pencucian uang yang tidak halal.

Oleh karena itu, perbankan nasional diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem *Know Your Customer Principle* sehingga manajemen bank dan otoritas perbankan dapat mewaspadai terjadinya transaksi yang mencurigakan. Kegagalan bank untuk menerapkan kebijakan dan sistem dimaksud dapat menimbulkan akibat hukum baik sanksi perdata (berupa pidana denda) maupun sanksi pidana (berupa pidana penjara dan atau denda) terhadap bank tersebut.

Adapun Asas-asas Perbankan, termasuk didalamnya perbankan syari'ah dalam upaya mengantisipasi *money laundering* adalah sebagai berikut :

1). Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk

menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Asas kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kaitan prinsip kepercayaan dengan kegiatan *money laundering* adalah dalam hal bank tidak melakukan upaya-upaya mengantisipasi dan memberantas tindakan *money laundering*, atau jika bank ikut mendukung tindakan tersebut, maka bank harus menghadapi resiko, resiko operasional yang merupakan resiko kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung dan resiko hukum berkait dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dengan demikian reputasi bank akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepercayaan bank.

2). Asas kehati-hatian (*prudential principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan dan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Tujuan dilakukannya prinsip ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan.

Hubungan asas kehati-hatian ini dengan tindak pidana pencucian uang, yakni asas ini merupakan peringatan (*warning*) pada bank agar berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan. Asas kehati-hatian ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

3). Asas mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principle*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip Mengenal Nasabah adalah : “ Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.”

Prinsip ini merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan *money laundering*, yang banyak dilakukan melalui perbankan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan asas mengenal nasabah ini adalah :

- Meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan.
- Menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktifitas ilegal yang dilakukan nasabah.
- Melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Asas mengenal nasabah memiliki urgensi yang mendasar dalam transaksi perbankan yang sangat berkaitan dengan e-banking dimana transaksi ini memberikan akses yang cepat bagi nasabah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

4). Asas Kerahasiaan (*Secrery Principle*)

Asas kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai untuk melindungi pencucian uang, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut hukum dan hakim dalam melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang? Pertanyaan ini karena muncul salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya praktik-praktik pencucian uang dan sulitnya pemberantasan. Oleh karena itu UU TPPU memberikan fasilitas khusus kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan dalam Pasal 33 UU TPPU. Dengan demikian dengan berlakunya Pasal tersebut merupakan terobosan terhadap tembok rahasia bank yang kokoh.

Perbankan syari'ah juga dapat menanggulangi *money laundering* dilihat dari beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan

mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam pencucian uang, apabila tidak diperoleh informasi yang memuaskan maka transaksi-transaksi dibawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan :

1. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan langsung dengan penyedia jasa keuangan;
2. Penggunaan banyak rekening dengan alasan tidak jelas
3. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi dan kemudian dilakukan penarikan sekaligus
4. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening tidak aktif
5. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
6. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan: *Pertama*, praktek perbankan syari'ah dalam menerapkan prinsip "*kehalalan*" terhadap sumber mal yang masuk ke dalam perbankan syari'ah secara umum sudah dilaksanakan cukup baik, walaupun masih ada kekurangan dan

belum sempurna. Hal tersebut dapat dikatakan cukup baik, karena dapat dilihat dari mekanisme perbankan syari'ah dalam menerima mal yang masuk, serta dari asaa-asas perbankan syari'ah dan upayanya dalam mengantisipasi *money laundering*. Kedua, Perbankan syari'ah telah berusaha menerapkan prinsip "kehalalan" terhadap sumber mal yang masuk ke dalam perbankan syari'ah walaupun masih ada kekurangan dan belum sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme perbankan syari'ah dalam menerima mal yang masuk, serta dari asaa-asas perbankan syari'ah dan upayanya dalam mengantisipasi *money laundering*, contoh kecil dalam menerima mal yang masuk tidak ada pertanyaan uang tersebut darimana, kecuali nominal tertentu saja, ini menunjukkan bahwa bank syari'ah belum maksimal dalam menerima sumber mal yang masuk.

Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang.

UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - UU No 25 tahun 2003 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia No 3/1 O/PBII2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, M., *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing, 2003

Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Compton, N. Eric. 1991. *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey. Jakarta: Akademia Pressindo.

Mas'di, Gufron. A. 2000. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Radja Grafindo